

# KINERJA PENDIDIKAN KESETARAAN SEBAGAI SALAH SATU JENIS PENDIDIKAN NONFORMAL<sup>\*)</sup>

## THE PERFORMANCE OF EQUALITY EDUCATION AS A TYPE OF NON FORMAL EDUCATION

Ida Kintamani Dewi Hermawan  
Sekretariat Jenderal Kemdikbud, Jl. Jenderal Sudirman - Senayan  
Email: idakintamani@yahoo.com

**Abstract:** This paper aims to analyze the goals, the profile and the performance of equality education. This study employs the documentation method by using the three publications: facts and figures of educational equality profile, statistics of nonformal education, and profile of nonformal education. This study analyzes the national level data attained by calculating the five indicators of equity and seven indicators of the quality of education. Performance of equality education is attained from the average value of education equity and quality. The results showed that the equity of Package A is the biggest (87.22) and the smallest is Package C (79.77), so that the average value of equity of equality education is 83.24. In contrast, the quality of Package B is the largest (64.61) and Package A is the smallest (48.03) so that the average value of quality of equality education is 54.86. On the basis of the equity and quality value, the largest performance is Package B with the value of 73.68 and the smallest is Package C with the value of 65.85. Thus, the performance of equality education only achieves 69.05 or less than 70%.

**Keywords:** potential regions, formal education, nonformal education, equality education, performance

**Abstrak:** Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis sasaran pendidikan kesetaraan, profil pendidikan kesetaraan, dan kinerja pendidikan kesetaraan. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi menggunakan tiga terbitan, yaitu Profil Pendidikan Kesetaraan dalam Fakta dan Angka, Statistik Pendidikan Nonformal, dan Profil Pendidikan Nonformal. Data yang digunakan pada tingkat nasional dengan menghitung lima indikator pemerataan dan tujuh indikator mutu pendidikan. Kinerja pendidikan kesetaraan diperoleh melalui rata-rata perhitungan nilai pemerataan dan mutu pendidikan kemudian dibagi dua. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerataan Paket A yang terbesar dengan nilai 87,22 dan Paket C yang terkecil dengan nilai 79,77 sehingga rata-rata pendidikan kesetaraan sebesar 83,24. Sebaliknya, nilai mutu Paket B yang terbesar dengan nilai 64,61 dan Paket A yang terkecil dengan nilai 48,03 sedangkan rata-rata pendidikan kesetaraan sebesar 54,86. Berdasarkan nilai pemerataan dan mutu maka kinerja Paket B yang terbesar dengan nilai 73,68 dan Paket C yang terkecil dengan nilai 65,85. Dengan demikian, kinerja pendidikan kesetaraan sebesar 69,05 atau hanya tercapai kurang dari 70%.

**Kata kunci:** potensi daerah, pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan kesetaraan, kinerja

### Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) pasal 13 ayat 1 menegaskan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling mengganti dan memperkaya. Berdasarkan definisi dari pasal 1 ayat 11, 12, dan 13 masing-masing jalur pendidikan mempunyai kejelasan makna dan pengertian. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Depdiknas, 2003).

Layanan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat pada jalur pendidikan nonformal mempunyai dimensi yang sangat luas, karena dapat meningkatkan

<sup>\*)</sup> Diterima tanggal 9 September 2011 - dikembalikan tanggal 27 Desember 2011 - disetujui tanggal 1 Maret 2012

ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap kepribadian peserta didik. Sesuai dengan fungsinya sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan maka pendidikan nonformal dapat diberikan kepada masyarakat yang mempunyai kondisi khusus. Kekhususan layanan pendidikan nonformal ini bisa disebabkan karena faktor ekonomi (kurang mampu/miskin), geografis (terpencil), sosial (pengangguran, mantan pelaku kriminal, dan lainnya), psikososial (tidak mau masuk pendidikan formal), atau faktor-faktor lain. Oleh karena itu, anak dari kelompok masyarakat marjinal tersebut berhak atas pendidikan yang layak. Fakta menunjukkan bahwa adanya faktor-faktor tersebut menyebabkan banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah, anak putus sekolah, anak berada di daerah terpencil yang belum mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan sumber daya pembangunan.

Salah satu jenis pendidikan nonformal adalah pendidikan kesetaraan, yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang tidak bersekolah akibat kemiskinan, keterpenciran, dan keterbelakangan. Jumlah sasaran pendidikan kesetaraan yang ada di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Untuk itulah pendidikan kesetaraan menjadi dasar yang penting bagi seluruh anak bangsa untuk mendapatkan layanan pendidikan, di mana pun berada dan kapan pun waktunya.

Banyak anak yang berada di daerah terpencil dan masyarakat miskin yang belum dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan data dari Ikhtisar Pendidikan Nasional tahun 2008/2009 jumlah peserta didik yang belum terlayani dari tingkat SD sampai SM sebanyak 2.362.825 orang. (Depdiknas, 2009a). Apabila dijabarkan lebih lanjut jumlah sasaran peserta pendidikan kesetaraan untuk Program Paket A sebanyak 533.183 orang, Program Paket B sebanyak 555.596, dan Program Paket C sebanyak 1.274.046 orang. Akan tetapi karena kemampuan pemerintah yang masih terbatas, sampai tahun 2008, kemampuan pemerintah memberikan layanan pendidikan Program Paket A sebanyak 133.873 orang dan Program Paket B sebanyak 487.541 orang (Depdiknas, 2009b). Sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan, alokasi sumber daya pendidikan kesetaraan banyak diberikan untuk Program Paket A dan Program Paket B, yang sejalan dengan program penuntasan wajib belajar

pendidikan dasar 9 tahun. Program Paket C banyak dilakukan dengan menggunakan peran serta atau swadaya masyarakat. Melihat kondisi di atas maka masih banyak anak-anak usia sekolah atau dewasa yang sampai saat ini belum terlayani pendidikannya.

Sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam UU 20/2003 maka "pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan". Prinsip ini mengilhami seluruh pengampu dan perencana pendidikan untuk terus mendorong peran aktif lembaga pemerintah, swasta, dan usaha negara agar memberikan dukungan penuh penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat (Depdiknas, 2003). Sesuai dengan karakteristik yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal, khususnya pendidikan kesetaraan maka Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PNFI, Kemdiknas (pada tahun 2011 Direktorat ini dihilangkan sedangkan program-programnya dimasukkan pada Direktorat Pembinaan SD, SMP, dan SMA) memberikan panduan bagi komponen masyarakat yang akan terlibat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu, terpencil, terbelakang, atau mereka yang mempunyai kebutuhan khusus, sehingga mereka mampu menjadi anak bangsa yang cerdas, mandiri, dan terampil dalam memberdayakan diri, lingkungan dan potensi alamnya untuk kesejahteraan bersama.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang terjadi dalam pendidikan kesetaraan adalah 1) Siapakah sasaran pendidikan kesetaraan?, 2) Bagaimana profil pendidikan kesetaraan saat ini?, 3) Bagaimana kinerja pendidikan kesetaraan saat ini?, dan 4) Apakah kinerja pendidikan kesetaraan menyebabkan Direktorat Pendidikan Kesetaraan dihapuskan pada tahun 2011?

Tujuan penulisan ini adalah memberikan gambaran kepada seluruh *stakeholder* tentang tiga hal, yaitu 1) sasaran pendidikan kesetaraan; 2) profil pendidikan kesetaraan; dan 3) kinerja pendidikan kesetaraan. Dengan demikian, dapat dikatakan bagaimana pendidikan kesetaraan dalam menghadapi tantangan, hambatan dan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, diharapkan akan menumbuhkan persepsi, semangat dan komitmen baru dari seluruh komponen bangsa untuk

berperan aktif dalam membantu pendidikan masyarakat yang kurang mampu, terpencil, terbelakang atau kelompok masyarakat yang marginal walaupun Direktorat Pendidikan Kesetaraan dihapuskan pada tahun 2011.

### Kajian Teori

Berdasarkan tujuan maka dalam kajian teori ini perlu diketahui terlebih dahulu tentang pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan kesetaraan, dan kinerja pendidikan kesetaraan.

### Pendidikan Formal

Amanat pembukaan UUD 1945 dan visi pendidikan nasional menunjuk pada suatu landasan filsafat yang mendalam. Dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa "setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan". UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 5 menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat". Hal ini sejalan dengan hak asasi manusia, bahwa setiap warga negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Depdiknas, 2003).

Pada saat ini, masih banyak anak usia sekolah dan orang dewasa yang belum mendapatkan layanan pendidikan yang memadai dan layak. Hal ini terjadi karena berbagai tantangan dan permasalahan yang melingkupi pembangunan pendidikan nasional. Faktor penyebab masih banyaknya masyarakat yang belum menerima layanan pendidikan bermutu karena kekurangan anggaran pendidikan, sebaran wilayah yang sangat luas, jumlah penduduk yang sangat besar, serta ketersediaan infrastruktur pembangunan pendidikan masih kurang dan belum merata. Berdasarkan Rencana Strategi Pendidikan 2005-2009 (Renstra 2005-2009) menggunakan tiga pilar kebijakan, yaitu 1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 2) peningkatan mutu layanan pendidikan; dan 3) akuntabilitas dan pencitraan publik. Pembangunan pendidikan telah berjalan dengan baik, Infrastruktur pendidikan dibangun di berbagai pelosok tanah air, begitu juga standarisasi layanan pendidikan telah dilakukan, termasuk upaya melibatkan peran

aktif masyarakat menyelenggarakan pendidikan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Itu semua berkat kerja keras seluruh komponen pendidikan yang dengan sungguh-sungguh menggalang potensi untuk membangun pendidikan yang bermutu dan berkemampuan meningkatkan keterampilan serta kesejahteraan masyarakat (Depdiknas, 2007).

Jumlah anak usia sekolah yang terlayani pendidikan semakin baik, hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pendidikan dasar dan menengah. APK adalah perbandingan antara siswa jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dikalikan 100. APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah usia sekolah yang sesuai dikalikan 100. Tingkat pencapaian pendidikan dilihat dari APK dan APM untuk jenjang SD, SMP, dan SM. Untuk SD dengan penduduk usia 7-12 tahun, SMP dengan penduduk usia 13-15 tahun, SM dengan penduduk usia 16-18 tahun. Data tahun 2009 menunjukkan bahwa APM SD sebesar 95,23%, APK SMP sebesar 98,11% dan APK SM sebesar 69,60%. (Pusat Statistik Pendidikan, 2009).

### Pendidikan Nonformal

Berdasarkan Bab Kelima UU No.20/2003 pasal 26 dinyatakan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai penganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (Depdiknas, 2003).

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi

masyarakat yang memerlukan bantuan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

### **Pendidikan Kesetaraan**

Pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan Program Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP dan Program Paket C setara SMA, dengan memberikan penekanan pada peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap kepribadian kepada peserta didik. Pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), PKBM, Lembaga Pelatihan Kursus (LPK), Organisasi Sosial (Orsos), Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pondok Pesantren. Bahkan, mulai tahun 2008 telah dibuka kesempatan lembaga kursus/pelatihan dapat turut serta menyelenggarakan pendidikan kesetaraan khususnya untuk percepatan peningkatan keterampilan peserta didik. Sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional lulusan pendidikan kesetaraan mempunyai hak eligibilitas untuk meneruskan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal, serta memiliki pengakuan yang sama ketika mereka memasuki dunia kerja (Direktorat Pendidikan Kesetaraan, 2010).

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang dilakukan oleh masyarakat mempunyai dinamika dan kualitas yang beragam karena kemampuan peserta didik, lembaga penyelenggara serta kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap mutu lulusan pendidikan kesetaraan yang ada di daerah. Untuk mengurangi permasalahan dan peningkatan mutu layanan pendidikan kesetaraan maka pemerintah menetapkan standar kompetensi lulusan peserta didik, standar isi, proses dan sistem penilaian kepada peserta didik. Sebagai sebuah pendidikan alternatif, pendidikan

kesetaraan mempunyai sasaran peserta didik yang spesifik, yaitu anak usia sekolah maupun dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan formal karena adanya lima hambatan, yaitu ekonomi, waktu, geografis, keyakinan, dan sosial/hukum. Hambatan ekonomi terjadi akibat kemiskinan di kalangan petani, nelayan, buruh, pekerja rumah tangga, tenaga kerja wanita, penduduk di daerah kumuh maupun penduduk miskin di daerah kota. Hambatan waktu karena pekerjaan mereka sebagai pengrajin, buruh, dan pekerja kasar lainnya. Hambatan geografis, seperti masyarakat suku terasing, etnik minoritas, masyarakat terisolir di kepulauan atau tengah hutan. Hambatan keyakinan, yaitu masyarakat pondok pesantren (salafiyah) yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal. Hambatan sosial/hukum seperti anak jalanan, anak lembaga pemasyarakatan, dan anak penyandang masalah sosial lainnya. Pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik tetap mengacu pada standar kompetensi lulusan serta peraturan lainnya dalam kerangka peningkatan mutu lulusan untuk mandiri, kreatif, dan profesional.

Peserta didik pendidikan kesetaraan adalah anak usia sekolah dan dewasa yang belum mampu menyelesaikan SD, SMP, dan SM. Dilihat dari sisi peserta didik kesetaraan mempunyai dimensi yang luas, yaitu warga negara yang belum menyelesaikan pendidikan karena keterbatasan yang dimiliki baik di bidang ekonomi, sosial, budaya atau karena kondisi geografis maka mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan. Untuk itu, pendidikan kesetaraan yang dapat dikatakan sebagai pendidikan alternatif mempunyai peranan yang strategis untuk mengatasi masalah pendidikan masyarakat yang belum beruntung karena kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakmampuan lainnya. Bila dilihat dari sisi latar belakang sosial ekonomi peserta didik kesetaraan adalah masyarakat kurang mampu dengan jenis profesi sebagai buruh, petani, nelayan, perambah hutan, masyarakat di daerah terpencil, dan lain sebagainya. Namun, terdapat kelompok masyarakat kaya di perkotaan yang karena kurang bisa menerima sistem pendidikan persekolahan mereka mengadakan kegiatan pendidikan sekolah rumah (*home schooling*) yang hasil akhir ujiannya mengikuti pendidikan kesetaraan. Jadi, layanan pendidikan kesetaraan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa mengenal suku, agama,

ras, atau golongan dengan usia berapa pun selama masih mempunyai minat dan kemauan untuk terus belajar.

Tantangan pendidikan kesetaraan ke depan adalah semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan orientasi pendidikan di masyarakat, tuntutan kualitas penyelenggaraan dan membangun citra pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif. Selain kondisi tersebut, jumlah pengangguran yang besar, kemiskinan masyarakat, masih rendahnya pendidikan penduduk, dan perlunya pengembangan keterampilan masyarakat menjadi fokus untuk layanan pendidikan kesetaraan di masa depan. Untuk menangkap kebutuhan masyarakat tersebut maka program pendidikan kesetaraan diarahkan untuk menuju pada tiga spektrum pendidikan, yaitu 1) akademik murni, 2) vokasi terintegrasi dan 3) vokasi murni. Dengan ketiga spektrum ini diharapkan kebutuhan peserta didik untuk membekali dirinya dengan pendidikan dan keterampilan tercapai dan pada akhirnya masyarakat yang berpendidikan dapat terwujud (Direktorat Pendidikan Kesetaraan, 2010).

### Kinerja Pendidikan Kesetaraan

Kinerja menurut Kamus Besar Indonesia adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja ([www.KamusBahasaIndonesia.org](http://www.KamusBahasaIndonesia.org)). Dengan demikian, kinerja pendidikan adalah apa yang telah dicapai oleh pendidikan, prestasi yang diperlihatkan oleh pendidikan, dan kemampuan kerja pendidikan. Kinerja pendidikan kesetaraan adalah apa yang telah dicapai oleh pendidikan kesetaraan, prestasi yang diperlihatkan oleh pendidikan kesetaraan, dan kemampuan kerja pendidikan kesetaraan.

Kinerja pendidikan kesetaraan digambarkan dari Renstra 2005-2009 menggunakan tiga pilar pembangunan pendidikan, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, dan tata kelola dan akuntabilitas pendidikan. Berdasarkan Renstra 2005-2009 maka dapat dihitung indikator pendidikan sesuai dengan dua pilar pendidikan. Pilar ketiga belum dapat diterapkan terhadap data yang dimiliki (Depdiknas, 2007).

Indikator pendidikan yang dihasilkan dari Renstra 2005-2009 menggunakan lima indikator pemerataan dan tujuh indikator mutu. Indikator pemerataan terdiri

dari APK, Rasio peserta didik per kelompok belajar, Rasio peserta didik per tutor, Perbedaan gender, dan Rasio gender. Dengan menggunakan standar seperti yang disajikan pada Tabel 1 maka diperoleh nilai pemerataan.

Tabel 1. Standar Pemerataan Pendidikan Kesetaraan

No.	Jenis Indikator	Paket A	Paket B	Paket C
1	APK	1	5	3
2	R-PD/KB	20	20	20
3	R-PD/T	10	5	5
4	PG	0	0	0
5	RG	1	1	1

Indikator mutu terdiri dari Persentase usia peserta didik, Persentase lulusan UNPK, Persentase pekerjaan tutor/tutor guru, Persentase tingkat pendidikan tutor/tutor S1 ke atas, Persentase tingkat pendidikan pengelola/pengelola S1 ke atas, Persentase pelatihan pengelola, dan Satuan biaya. Dengan menggunakan standar seperti yang disajikan pada Tabel 2 maka diperoleh nilai mutu. Kemudian, rata-rata nilai pemerataan dan nilai mutu merupakan kinerja pendidikan kesetaraan.

Tabel 2. Standar Mutu Pendidikan Kesetaraan

No.	Jenis Indikator	Paket A	Paket B	Paket C
1	%Usia PD	50	50	50
2	%Lls UNPK	100	100	100
3	%Tutor Guru	100	100	100
4	%Tutor S1	100	100	100
5	%Pengelola S1	100	100	100
6	%Pelatihan Pengelola	100	100	100
7	Satuan Biaya	687	687	687

Catatan: Usia PD Paket A = 7-12 tahun, Paket B = 13-15 tahun, dan Paket C = 16-18 tahun. Satuan biaya yang digunakan adalah rata-rata pendidikan kesetaraan.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi menggunakan tiga terbitan, yaitu 1) Profil Pendidikan Kesetaraan dalam Fakta dan Angka yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Kesetaraan (2010), 2) Statistik Pendidikan Nonformal 2008/2009 (Depdiknas, 2009b), dan 3) Profil Pendidikan Nonformal 2008/2009 (Kemdiknas, 2010). Dua data terakhir adalah terbitan dari Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang, Kemdiknas. Populasi yang digunakan adalah data Pendidikan Kesetaraan seluruh provinsi. Data yang dilakukan analisis adalah

tahun 2008/2009 sesuai dengan ketersediaan data saat ini. Teknik analisis yang digunakan adalah secara deskriptif sehingga bisa digambarkan Kinerja Pendidikan

#### **Kesetaraan secara nasional**

Untuk menghitung indikator pemerataan pendidikan dan mutu pendidikan kesetaraan dapat dilihat dari rumusan berikut ini (Pusat Data dan Informasi Pendidikan, 2008).

#### **Angka Partisipasi Kasar (APK)**

APK adalah perbandingan antara peserta didik terhadap penduduk usia sekolah yang sesuai.

#### **Rumus:**

$$\text{APK} = \frac{\text{Peserta Didik}}{\text{Penduduk usia sekolah}} \times 100$$

Keterangan: Paket A dengan penduduk 7-12 tahun, Paket B dengan penduduk 13-15 tahun, dan Paket C dengan penduduk 16-18 tahun, rata-rata kesetaraan dengan penduduk 7-18 tahun.

#### **Rasio peserta didik per kelompok belajar (R-PD/KB)**

R-PD/KB adalah perbandingan antara peserta didik dengan kelompok belajar

#### **Rumus:**

$$\text{R-PD/KB} = \frac{\text{Peserta Didik}}{\text{Kelompok Belajar}} \times 100$$

Keterangan: Paket A adalah peserta didik Paket A dengan kelompok belajar Paket A, hal yang sama untuk Paket B dan Paket C.

#### **Rasio peserta didik per tutor (R-PD/T)**

R-PD/T adalah perbandingan antara peserta didik dengan tutor.

#### **Rumus:**

$$\text{R-PD/T} = \frac{\text{Peserta Didik}}{\text{Tutor}} \times 100$$

Keterangan: Paket A adalah peserta didik Paket A dengan tutor Paket A, hal yang sama untuk Paket B dan Paket C.

#### **Perbedaan gender (PG)**

PG adalah pengurangan antara % peserta didik laki-laki dengan perempuan. PG ada tiga hal, tidak ada PG bila nilainya 0 yang terbaik, bila nilainya + berarti ada PG dan laki-laki diuntungkan, dan bila nilainya - berarti ada PG dan perempuan diuntungkan.

#### **Rumus:**

$$\text{PG} = \% \text{ Laki-laki} - \% \text{ Perempuan}$$

Keterangan: Paket A adalah % peserta didik laki-laki Paket A - % peserta didik perempuan Paket A, hal yang sama untuk Paket B dan Paket C.

#### **Rasio gender (RG)**

RG adalah pembagian antara % peserta didik perempuan dengan laki-laki. RG ada tiga hal, seimbang bila nilainya 1 yang terbaik, bila nilainya 0,99 atau 1,01 berarti mendekati seimbang dan di luar nilai di atas berarti tidak seimbang.

#### **Rumus:**

$$\text{RG} = \% \text{ Perempuan} / \% \text{ Laki-laki}$$

Keterangan: Paket A adalah % peserta didik perempuan Paket A dibagi % peserta didik laki-laki Paket A, hal yang sama untuk Paket B dan Paket C.

#### **Persentase usia peserta didik (%UsiaPD)**

%UsiaPD adalah perbandingan antara peserta pada usia tertentu dibagi dengan peserta didik semua usia.

#### **Rumus:**

$$\% \text{ Usia PD} = \frac{\text{PD usia tertentu}}{\text{PD seluruhnya}} \times 100$$

Keterangan: Peserta didik usia tertentu adalah 7-12 tahun untuk Paket A, 13-15 tahun untuk Paket B, 16-18 tahun untuk Paket C, dan usia >18 tahun

#### **Persentase lulusan UNPK (%LUNPK)**

%LUNPK adalah perbandingan antara lulusan UNPK dengan peserta UNPK

#### **Rumus:**

$$\% \text{ LIs UNPK} = \frac{\text{Lulusan UPNK}}{\text{Peserta UNPK}} \times 100$$

### Persentase Tutor Guru (%Tutor G)

%Tutor G adalah perbandingan antara tutor yang berasal dari guru dengan tutor seluruhnya.

#### Rumus:

$$\% \text{ Tutor G} = \frac{\text{Tutor dari Guru}}{\text{Tutor seluruhnya}} \times 100$$

### Persentase Tutor S1 ke atas (%TutorS1+)

%Tutor S1+ adalah perbandingan antara tutor yang memiliki ijazah S1 ke atas dengan tutor seluruhnya.

#### Rumus:

$$\% \text{ Tutor S1+} = \frac{\text{Tutor S1 ke atas}}{\text{Tutor seluruhnya}} \times 100$$

### Persentase Pengelola S1 ke atas (%Pengelola S1+)

%Pengelola S1+ adalah perbandingan antara pengelola yang memiliki ijazah S1 ke atas dengan pengelola seluruhnya.

#### Rumus:

$$\% \text{ Pengelola S1+} = \frac{\text{Pengelola S1 ke atas}}{\text{Pengelola seluruhnya}} \times 100$$

### Persentase pelatihan pengelola (%Pengelola Latih)

%PengelolaLatih adalah perbandingan antara pengelola yang sudah mendapatkan pelatihan pendidikan kesetaraan dengan pengelola seluruhnya.

#### Rumus:

$$\% \text{ PengelolaLatih} = \frac{\text{Pengelola yg Dilatih}}{\text{Pengelola seluruhnya}} \times 100$$

### Satuan biaya (SB)

SB adalah perbandingan antara biaya yang dikeluaran untuk pendidikan kesetaraan dengan peserta didik pendidikan kesetaraan.

#### Rumus:

$$SB = \frac{\text{Biaya}}{\text{Peserta Didik}} \times 100$$

### Hasil dan Pembahasan

Program pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, oleh karena itu pemerintah bersama masyarakat memberikan perhatian yang konsisten dan serius. Hal ini menjadi pilihan strategi pembangunan nasional, karena kualitas pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas manusianya dan pendidikan menjadi kunci utama percepatan pembangunan nasional. Pendidikan persekolahan yang meliputi sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi telah memberikan layanan pada masyarakat secara optimal, namun masih ada kelompok masyarakat yang belum memperoleh pendidikan yang layak, karena faktor kemiskinan, keterbelakangan, dan keterpencilannya. Untuk itu, pemerintah memberikan program layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang belum beruntung tersebut melalui layanan pendidikan kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.

### Sasaran Pendidikan Kesetaraan

Sasaran pendidikan kesetaraan seperti yang disajikan pada Tabel 3 adalah berdasarkan putus sekolah dan lulusan tidak melanjutkan. Putus SD sebanyak 437.608 anak menjadi sasaran Paket A. Putus SMP sebanyak 214.775 anak dan lulusan SD tidak melanjutkan ke SMP sebanyak 258.812 menjadi sasaran Paket B sehingga mencapai 473.587. Putus SM sebanyak 235.744 dan lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SM sebanyak 809.160 menjadi sasaran Paket C sehingga mencapai 1.044.904 orang. Jumlah seluruh sasaran pendidikan kesetaraan sebanyak 1.956.099. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa putus SD yang terbesar karena banyak orang tua yang menganggap bahwa pendidikan anak cukup sampai bisa membaca dan menulis sedangkan lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SM sangat besar karena memerlukan biaya yang lebih tinggi.

Dari jumlah sasaran tersebut jumlah anggaran yang tersedia untuk menuntaskan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C yang disedia-

Tabel 3. Sasaran Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Putus Sekolah dan Lulusan Tidak Melanjutkan Tahun 2008/2009

Putus Sekolah		Lulusan Tidak Melanjutkan		Sasaran	Jumlah
SD	437,608			Paket A	437,608
SMP	214,775	ke SMP	258,812	Paket B	473,587
SM	235,744	ke SM	809,160	Paket C	1,044,904
Jumlah	888,127	ke SMP & SM	1,067,972	Jumlah	1,956,099

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional, 2009b

Tabel 4. Anggaran Direktorat Pendidikan Kesetaraan Tahun 2005-2009

Program	Wajar Dikdas	PNF	MPP (Manajemen)	Jumlah
2005	363,912,000,000	25,910,325,000	28,551,284,186	418,373,609,186
2006	393,912,000,000	26,625,450,334	930,530,657	421,467,980,991
2007	701,344,000,000	80,937,660,000	218,797,780,000	1,001,079,440,000
2008*)	662,624,461,000	49,656,070,000	28,916,785,000	741,197,316,000
2009	662,000,000,000	50,000,000,000	10,574,166,000	722,574,166,000

Sumber: Dit. Pendidikan Kesetaraan, 2010 Catatan: \*) pasca pemotongan

kan oleh pemerintah masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan pendidikan formal. Sesuai dengan kebijakan pembangunan pendidikan, prioritas pendidikan kesetaraan adalah untuk Paket A dan B, sebagai bagian dari program nasional untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Anggaran pemerintah pusat melalui APBN untuk program pendidikan kesetaraan selama 5 tahun dari tahun 2005 sampai tahun 2009 disajikan pada Tabel 4. Selama 5 tahun data maka dana terbesar terserap untuk wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang selalu meningkat dari Rp 363.912.000.000 ribu pada tahun 2005 menjadi Rp 662.000.000.000 ribu pada tahun 2009. Dana untuk PNF juga meningkat hampir dua kali lipat dari Rp 25.910.325.000 ribu menjadi Rp 50.000.000.000 ribu. Sebaliknya, dana untuk MPP menurun dari Rp 28.551.284.186 ribu menjadi Rp 10.574.166.000 ribu atau kurang dari separuhnya sedangkan tahun 2007 yang terbesar dan mencapai Rp 218.797.780.000 ribu. Secara keseluruhan, dana tahun 2005 sebesar Rp 418.373.609.186 ribu meningkat hampir dua kali menjadi Rp 722.574.166.000 ribu sedangkan dana terbesar adalah pada tahun 2007 sebesar Rp 1.001.079.440 ribu. (Direktorat Pendidikan Kesetaraan, 2010).

Dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat maka

dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan juga melibatkan swadaya masyarakat. Dari alokasi anggaran yang ada untuk penuntasan pendidikan kesetaraan yang tersebar di seluruh wilayah maka anggaran pendidikan kesetaraan untuk penyelenggaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, sesuai dengan kebijakan alokasi anggaran pembangunan didekonsentrasi ke Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi. Dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi merupakan dana bantuan pemerintah pusat yang peruntukannya digariskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (sekarang menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal). Alokasi dana dekonsentrasi masing-masing provinsi disesuaikan dengan jumlah sarasan peserta didik khususnya untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

#### Profil Pendidikan Kesetaraan

Profil pendidikan kesetaraan adalah gambaran tentang kondisi objektif pencapaian pembangunan pendidikan kesetaraan tahun 2008/2009 ditampilkan dalam bentuk tabel yang mudah dipahami. Aspek pendidikan kesetaraan adalah kelembagaan/kelompok belajar, peserta didik, pendidik dan tenaga

kependidikan (Depdiknas, 2009b) serta anggaran. (Direktorat Pendidikan Kesetaraan, 2010)

### **Kelembagaan/Kelompok Belajar**

Persebaran lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan yang beragam dan tersebar di seluruh Indonesia memberikan kontribusi yang baik untuk pelaksanaan program pendidikan di masyarakat. Bahkan, keberadaan lembaga di pelosok daerah yang sulit terjangkau juga memberikan warna lain atas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

Tabel 5. Kelompok Belajar Pendidikan Kesetaraan menurut Penyelenggara Tahun 2008/2009

No.	Program	PKBM	Masya-rakat	Lainnya	Jumlah
1.	Paket A	3,160	1,849	1,264	6,273
	%	50.37	29.48	20.15	100.00
2.	Paket B	10,454	5,157	1,976	17,587
	%	59.44	29.32	11.24	100.00
3.	Paket C	6,476	2,180	2,079	10,735
	%	60.33	20.30	19.37	100.00
	Jumlah	20,090	9,186	5,319	34,595
	%	58.07	26.55	15.38	100.00

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional, 2009b

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa kelompok belajar pendidikan kesetaraan sebesar 34.595, Paket B sebesar 17.857, Paket C sebesar 10.735, dan Paket A sebesar 6.273 yang terkecil. Kelompok belajar yang diselenggarakan oleh PKBM yang

terbesar, untuk Paket A sebesar 50,37%, Paket B sebesar 59,44%, dan Paket C sebesar 60,33%. Sebaliknya, kelompok belajar yang diselenggarakan masyarakat menduduki tempat kedua, masing-masing Paket A sebesar 29,48%, Paket B sebesar 29,32%, dan Paket C sebesar 20,30%. Kelompok belajar yang diselenggarakan oleh lainnya yang terkecil. Secara keseluruhan, pendidikan kesetaraan lebih banyak diselenggarakan oleh PKBM sebesar 20.090 atau 58,07%, masyarakat menyelenggarakan sebesar 9.186 atau 26,55% dan penyelenggara lainnya sebesar 5.319 atau 15,38%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peranan PKBM sangat besar dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan ini.

### **Peserta Didik**

Peserta didik pendidikan kesetaraan khusus Paket B dan C mempunyai jumlah yang cukup besar sedangkan program Paket A semakin lama semakin sedikit karena berbagai program penuntasan pendidikan dasar 9 tahun terus dilakukan, melalui perluasan layanan SD dan SMP, beasiswa, bantuan operasional sekolah (BOS), SMP terbuka, sekolah gratis dan lain-lainnya telah menunjukkan keberhasilan sehingga anak usia sekolah dasar 7–12 tahun telah banyak menyelesaikan pendidikannya. Anak usia SMP 13–15 tahun masih ada di sebagian daerah yang belum menikmati berbagai layanan pendidikan karena ketidakmampuan menyekolahkan anaknya ke SMP akibat biaya hidup yang tidak tercukupi. Karakteristik peserta didik paket C adalah mereka yang karena

Tabel 6. Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan menurut Kelompok Usia Tahun 2008/2009

No.	Program	Kelompok Usia				
		7-12 tahun	13-15 tahun	>15 tahun	Jumlah	%
1.	Kelompok Usia	7-12 tahun	13-15 tahun	>15 tahun	Jumlah	%
	Paket A	25,963	33,502	74,408	133,873	15.50
	%	19.39	25.03	55.58	100.00	
2.	Kelompok Usia	13-15 tahun	16-18 tahun	>18 tahun	Jumlah	
	Paket B	199,661	124,982	162,898	487,541	56.46
	%	40.95	25.64	33.41	100.00	
3.	Kelompok Usia	16-18 tahun	19-21 tahun	>21 tahun	Jumlah	
	Paket C	61,880	80,982	99,178	242,040	28.03
	%	25.57	33.46	40.98	100.00	
	Jumlah	287,504	239,466	336,484	863,454	100.00
	%	33.30	27.73	38.97	100.00	

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional, 2009b

Tabel 7. Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan menurut Jenis Kelamin  
Tahun 2008/2009

No.	Program	Laki2	Perem-puan	Jumlah	Laki2	% Pe-rempuan
1.	Paket A	66,500	67,373	133,873	49.67	50.33
2.	Paket B	268,210	219,331	487,541	55.01	44.99
3.	Paket C	138,285	103,755	242,040	57.13	42.87
	Jumlah	472,995	390,459	863,454	54.78	45.22

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional, 2009b

ketidakmampuan tidak meneruskan sekolah ke SMA, terus bekerja di berbagai bidang, setelah mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka menyelesaikan sekolah setingkat SMA-nya melalui Paket C.

Tabel 6 menunjukkan peserta didik pendidikan kesetaraan menurut kelompok usia. Pada kenyataannya, peserta didik Paket A terdiri dari tiga kelompok, yaitu 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan >15 tahun, peserta didik Paket B juga terdiri dari tiga kelompok, yaitu 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan >18 tahun, sedangkan peserta didik Paket C juga terdiri dari tiga kelompok, yaitu 16-18 tahun, 19-21 tahun, dan >21 tahun. Peserta didik secara nasional yang terbesar pada Paket B, yaitu 487.541 orang atau 56,46% jika dibandingkan dengan Paket C sebesar 242.040 atau 28,03% sedangkan Paket A yang terkecil, yaitu 133.873 orang atau 15,51%.

Program Paket A yang seharusnya diperuntukkan anak usia SD pada kenyataannya peserta didik yang berusia >15 tahun yang terbesar (55,58%) sedangkan usia 7-12 tahun yang terkecil (19,39%). Sebaliknya, untuk program Paket B ternyata usia peserta sesuai dengan ketentuan dan yang terbesar pada usia 13-15 tahun (40,95%) dan terkecil pada usia 16-18 tahun (25,64%). Hal yang sama dengan Paket A, ternyata peserta didik Paket C terbesar pada usia >21 tahun (40,98%) dan terkecil pada usia 16-18 tahun (25,57%). Bila kelompok pertama dianggap sebagai kelompok muda maka pada pendidikan kesetaraan terdapat 287.504 peserta didik muda (33,30%) jika dibandingkan ketentuan masuk sekolah sesuai jenjangnya. Sebaliknya, kelompok tua terdapat 336.484 peserta didik (38,97%) dan kelompok tengah sebesar 239.466 (27,73%). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan kesetaraan ini lebih banyak diikuti oleh kelompok yang lebih tua. Dengan melihat kondisi seperti ini, sasaran

peserta didik pendidikan kesetaraan tidak semuanya sesuai dengan tujuan dibentuknya program pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa peserta didik perempuan Paket A sedikit lebih besar daripada laki-laki masing-masing sebesar 50,33% berbanding 49,67%. Peserta didik Paket B lebih besar laki-laki (55,01%) daripada perempuan (44,99%) sedangkan peserta didik Paket C juga lebih besar laki-laki daripada perempuan sebesar 57,13% berbanding 42,87%. Secara keseluruhan, peserta didik pendidikan kesetaraan lebih banyak laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan masing-masing sebear 54,78% berbanding 45,22%. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa peserta didik laki-laki pada pendidikan kesetaraan memang lebih banyak daripada perempuan karena mendapatkan ijazah lebih penting bagi laki-laki daripada perempuan.

Salah satu tolok ukur keberhasilan pendidikan kesetaraan dapat dilihat dari pelaksanaan ujian nasional atas kompetensi pelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Semenjak tahun 2007 peserta ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) diikuti oleh peserta reguler program Paket A, B dan C juga diikuti oleh peserta gagal ujian nasional sekolah formal, hal ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 77, Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. (Depdiknas, 2009c). Pada tahun 2008, peserta UNPK yang diikuti oleh peserta didik baik reguler maupun gagal ujian nasional pendidikan formal secara nasional disajikan pada Tabel 8. (Direktorat Pendidikan Kesetaraan, 2010) Peserta dan lulusan UNPK dilakukan dalam dua tahap dengan peserta reguler dan gagal dari ujian formal sedangkan lulusan juga berasal dari reguler dan gagal dari ujian formal. Berdasarkan pada Tabel 8 maka peserta ujian reguler pada tahap pertama yang terbesar adalah Paket B (222.641

**Tabel 8. Peserta dan Lulusan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK)  
Tahun 2008/2009**

No.	Program	Tahap 1					Tahap 2				
		Peserta		Lulus			Peserta		Lulus		
		Reguler	Gagal Formal	Reguler	Gagal Formal	Jumlah	Reguler	Gagal Formal	Reguler	Gagal Formal	Jumlah
1.	Paket A	45,869	2,812	36,050	2,107	38,157	21,006	257	16,958	0	16,958
2.	Paket B	222,641	45,238	171,214	40,412	211,626	124,385	67	95,921	106	96,027
3.	Paket C	183,449	32,497	103,224	21,329	124,553	135,747	21	89,173	0	89,173
	Jumlah	451,959	80,547	310,488	63,848	374,336	281,138	345	202,052	106	202,158

Sumber: Dit. Pendidikan Kesetaraan, 2010

orang) dan terkecil pada Paket A (45.869 orang). Hal yang sama terjadi pada peserta ujian yang berasal dari gagal ujian formal yang terbesar juga pada Paket B (45.238 orang) dan terkecil pada Paket A (2.812 orang). Pada tahap kedua peserta ujian terbesar pada Paket C (135.747 orang) dan terkecil tetap pada Paket A (21.006 orang). Khusus untuk peserta yang berasal dari gagal ujian format ternyata terbesar pada Paket A (257 orang) dan terkecil pada Paket C (21 orang).

Lulusan terbesar pada tahap pertama juga pada Paket B (211.626 orang) dan terkecil pada Paket A (38.157 orang) sesuai dengan peserta ujian yang ada. Lulusan pada tahap kedua terbesar juga pada Paket B (96.027 orang) dan terkecil pada Paket A (16.958 orang). Bila dibandingkan antara tahap pertama dan kedua maka lulusan tahap pertama (374.336 orang) lebih besar daripada tahap kedua (202.158 orang).

#### **Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan kesetaraan memiliki keberagaman yang disesuaikan dengan kondisi lembaga penyelenggara, ketersediaan

sumber daya manusia maupun kemampuan lembaga dalam menggerakkan masyarakat untuk belajar di setiap satuan PNF penyelenggara pendidikan kesetaraan. Pendidik pada pendidikan kesetaraan disebut tutor sedangkan tenaga kependidikan dimaksud adalah pengelola.

Tabel 9 menyajikan tutor pendidikan kesetaraan menurut tingkat pendidikan dari SD/MI sampai S1/S2 kecuali tutor Paket C dari SMA/MA sampai S1/S2. Tutor terbesar pada Paket B sebesar 102.852 orang sedangkan terkecil adalah tutor Paket A sebesar 14.239 orang. Tutor Paket A terbesar adalah lulusan SMA/MA (39,19%), Paket B terbesar adalah lulusan Diploma (33,88%) sedangkan Paket C terbesar adalah lulusan S1/S2 (62,73%). Hal ini menunjukkan makin tinggi jenjang pendidikan maka tingkat pendidikan tutor juga makin tinggi. Secara keseluruhan program pendidikan kesetaraan tingkat pendidikan tutor terbesar juga pada S1/S2 sebesar 37,94% diikuti Diploma sebesar 31,82% dan terkecil SMA/MA sebesar 24,70%.

Tabel 10 menyajikan tutor pendidikan kesetaraan yang dirinci menurut jenis pekerjaan dan jenis kelamin. Jenis pekerjaan dimaksud adalah guru dan

**Tabel 9. Tutor Pendidikan Kesetaraan Menurut Tingkat Pendidikan  
Tahun 2008/2009**

No.	Program	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Diploma	S1/S2	Jumlah
1.	Paket A	121	859	5,580	4,724	2,955	14,239
	%	0.85	6.03	39.19	33.18	20.75	100.00
2.	Paket B	286	7,735	28,981	34,848	31,002	102,852
	%	0.28	7.52	28.18	33.88	30.14	100.00
3.	Paket C	-	-	4,790	10.984	26,547	42,321
	%	-	-	11,32	25.95	62.73	100.00
	Jumlah	408	8,608	39,419	50.623	60.555	159,612
	%	0.26	5.39	24.70	31.72	37.94	100.00

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional, 2009b

Tabel 10. Tutor Pendidikan Kesetaraan Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin  
Tahun 2008/2009

No.	Program	Guru			Nonguru			Jumlah		
		Laki2	Perem-puan	Jumlah	Laki2	Perem-puan	Jumlah	Laki2	Perem-puan	Jumlah
1.	Paket A	5,292	3,493	8,785	2,735	2,719	5,454	8,027	6,212	14,239
	%	60.24	39.76	100.00	50.15	49.85	100.00	56.37	43.63	100.00
2.	Paket B	43,730	24,182	67,912	14,910	20,030	34,940	58,640	44,212	102,852
	%	64.39	35.61	100.00	42.67	57.33	100.00	57.01	42.99	100.00
3.	Paket C	187	29,460	29,647	77	12,597	12,674	264	42,057	42,321
	%	0.63	99.37	100.00	0.61	99.39	100.00	0.62	99.38	100.00
	Jumlah	49,334	57,210	106,544	17,815	35,453	53,268	67,044	92,568	159,612
	%	46.30	53.70	100.00	33.44	66.56	100.00	42.00	58.00	100.00

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional, 2009b

Tabel 11. Pengelola Pendidikan Kesetaraan Menurut Tingkat Pendidikan  
Tahun 2008/2009

No.	Program	SMP/MTs	SMA/MA	Diploma	S1/S2	Jumlah
1.	Paket A	91	2,080	1,917	2,139	6,227
	%	1.46	33.40	30.79	34.35	100.00
2.	Paket B	214	4,661	5.300	7,317	17,492
	%	1.22	26.65	30.30	41.83	100.00
3.	Paket C	85	1,201	2,544	4,735	8.565
	%	0.99	14.02	29.70	55.28	100.00
	Jumlah	393	8,002	9,822	14,267	32,484
	%	1.21	24.63	30.24	43.92	100.00

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional, 2009b

nonguru sedangkan jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan. Jumlah tutor Paket B terbesar (102.852 orang), baik yang berasal dari guru sebesar 67.912 orang dan nonguru sebesar 34.940. Tutor Paket A terbesar adalah laki-laki (56,37%) lebih besar daripada perempuan (43,63%). Tutor Paket B terbesar adalah laki-laki (57,01%) lebih besar daripada perempuan (42,99%). Jumlah tutor pendidikan kesetaraan yang berasal dari guru (106.544 orang) lebih besar daripada nonguru (53.268 orang) sedangkan tutor yang pekerjaannya guru maupun nonguru lebih banyak perempuan masing-masing 53,70% guru dan 66,56% nonguru. Dengan demikian, dapat dikatakan pendidikan kesetaraan masih ditangani oleh guru pendidikan formal sehingga mutu pendidikan kesetaraan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa pengelola pendidikan kesetaraan terbesar terjadi di Paket B sebesar 17.492 orang, Paket C sebesar 8.565 orang sedangkan Paket A yang terkecil sebesar 6.227

orang. Tingkat pendidikan pengelola pendidikan kesetaraan bervariasi terdiri dari empat jenjang, yaitu SMP/MTs, SMA/MA, Diploma, dan S1/S2. Pengelola Paket A, Paket B, dan Paket C terbesar adalah lulusan S1/S2, masing-masing sebesar 34,35%, 41,83% dan 55,28%. Hal ini menunjukkan bahwa di semua jenjang pendidikan maka tingkat pendidikan pengelola terbedasar adalah S1/S2 sebesar 43,92% dan terkecil adalah SMP/MTs sebesar 1,21%.

### Anggaran

Anggaran program pendidikan kesetaraan berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, yang mekanisme pengalokasian dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan penggunaan keuangan pusat dan daerah. Alokasi anggaran disesuaikan dengan prioritas pembangunan pendidikan dengan alokasi terbesar untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun khususnya melalui Paket A dan B. Alokasi dana pendidikan kesetaraan dari pusat dibagi menjadi dana pusat dan dana dekonsentrasi

yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Dana pusat merupakan dana yang dikelola di pusat yang digunakan untuk mengembangkan program, peningkatan mutu layanan, dan bantuan sosial penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sedangkan dana dekonsentrasi digunakan untuk bantuan sosial penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C, serta manajemen pengelolaan di Provinsi. Kebijakan *budget sharing* yang dilakukan untuk pembangunan pendidikan sangat membutuhkan dukungan alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui APBD masing-masing daerah. Selain itu, pemerintah sebagai subjek sekaligus objek layanan pendidikan kesetaraan juga perlu berperan aktif mendukung penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, hal ini telah terjadi khususnya untuk penyelenggaraan Paket C yang anggarannya 90 persen berasal dari swadaya masyarakat. (Direktorat Pendidikan Kesetaraan, 2010).

Tabel 12. Sumber Dana Program Pendidikan Kesetaraan  
Tahun 2008/2009

No.	Program	Penyelenggaraan		Block Grant	
		Peserta Didik	Anggaran	Satuan Biaya	Jumlah
1.	Paket A	81,020	42,512,619	500	40,510,000
2.	Paket B	436,046	515,406,931	1,122	489,243,612
3.	Paket C	27,530	35,222,856	1,222	33,641,660
	Jumlah	544,596	593,142,406	948	563,395,272

Berdasarkan Tabel 12 diketahui bahwa program Paket B dengan peserta didik 436.046 orang yang terbesar sehingga anggaran penyelenggaranya juga yang terbesar (Rp 515.406.931 ribu). Program Paket C dengan peserta didik yang terkecil sebesar 27.530 orang dengan dana yang terkecil pula (Rp 35.222.856 ribu). Bila dilihat dari *block grant* yang ada maka satuan biaya terbesar justru pada Paket C sebesar Rp 1.222 ribu sehingga jumlah *block grant* sebesar Rp 33.641.660 ribu sedangkan satuan biaya terkecil pada Paket A sebesar Rp 500 ribu sehingga jumlah *block grant* sebesar Rp 40.510.000 ribu. Seperti halnya banyaknya peserta didik dan anggaran untuk Paket B maka *block grant* Paket B juga yang terbesar Rp 489.243.612 ribu walaupun satuan biaya Rp 1.122 ribu lebih kecil daripada satuan biaya Paket C. Secara keseluruhan jumlah peserta didik sebesar

544.596 dengan anggaran sebesar Rp 593.142.406 ribu dengan satuan biaya rata-rata sebesar Rp 948 ribu dengan anggaran sebesar Rp 593.395.272 ribu

### Kinerja Pendidikan Kesetaraan

Ketercapaian pendidikan kesetaraan diukur dari Renstra 2005-2009 menggunakan dua pilar kebijakan, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Kinerja pendidikan kesetaraan diukur dari rata-rata pemerataan dan mutu pendidikan yang diperoleh.

### Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

Indikator yang digunakan untuk mengukur pemerataan dan perluasan akses pendidikan ada lima jenis, yaitu 1) APK, 2) rasio peserta didik per kelompok belajar, 3) rasio peserta didik per tutor, 4) perbedaan gender, dan 5) rasio gender.

Tabel 13. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan Tahun 2008 dan 2009

No.	Program	2008	2009	Pertumb
1.	Paket A	0.50	0.56	11.34
2.	Paket B	3.74	4.15	11.02
3.	Paket C	1.86	2.24	20.17
	Rata-rata	1.64	1.86	13.32

Berdasarkan data Tabel 13, bila data tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2009 maka untuk APK Paket A tahun 2008 dari 0,50% meningkat menjadi 0,56% tahun 2009 atau meningkat 11,34% per tahun sedangkan Paket B dari 3,74% menjadi 4,15% atau meningkat sebesar 11,02% per tahun. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Peningkatan APK Paket C terbesar dari 1,86% menjadi 2,24% atau meningkat sebesar 20,17% per tahun. Jadi, APK pendidikan kesetaraan sebesar 1,64% meningkat menjadi 1,86% atau meningkat sebesar 13,32% per tahun. Selain itu, oleh karena program kesetaraan adalah sebagai pendukung pendidikan formal maka wajar jika pencapaian APK tidak terlalu besar.

Tabel 14. Rasio Peserta Didik per Kelompok Belajar dan Tutor Tahun 2008/2009

Program	PD/KB	PD/T
Paket A	21.34	9.40
Paket B	27.72	4.74
Paket C	22.55	5.72
Rata-rata	24.96	5.41

kesejajaran gender di segala bidang perlu dilakukan pengelolaan data berwawasan gender secara sistematis, teratur, dan berkesinambungan.

Berdasarkan Tabel 15, perbedaan gender terbesar pada Paket C sebesar 14,27%, Paket B sebesar 10,03% sedangkan Paket A sebesar -0,65% berarti lebih banyak perempuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Paket A cenderung perempuan agar dapat memperoleh ijazah Paket A sedangkan pada jenjang lebih tinggi laki-laki yang lebih banyak bersekolah di Paket B maupun Paket C. Dengan demikian, Paket A berdasarkan rasio gender sebesar 1,01 berarti telah mendekati keseimbangan gender sedangkan baik Paket B (0,82) maupun Paket C (0,73) belum ada keseimbangan gender karena masih jauh dari angka 1. Jadi, masih terjadi perbedaan gender pendidikan kesetaraan sebesar 9,56%

Tabel 15. Perbedaan Gender dan Rasio Gender Pendidikan Kesetaraan Tahun 2008/2009

No.	Program	% Peserta Didik		Perbedaan Gender	Rasio Gender
		Laki2	Perempuan		
1.	Paket A	49.67	50.33	-0.65	1.01
2.	Paket B	55.01	44.99	10.03	0.82
3.	Paket C	57.13	42.87	14.27	0.75
	Rata-rata	54.78	45.22	9.56	0.83

Berdasarkan Tabel 14, rasio peserta didik per kelompok belajar 2008/2009 pendidikan kesetaraan sebesar 24,96, Paket A sebesar 21,34, Paket B sebesar 27,72, dan Paket C sebesar 22,55. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Paket B memiliki partisipasi peserta didik yang lebih besar jika dibandingkan dengan jenis paket lainnya. Rasio peserta didik per tutor 2008/2009 pendidikan kesetaraan sebesar 5,41, Paket A terbesar sebesar 9,40 dan Paket B terkecil sebesar 4,74. Dengan demikian, Paket B memiliki tutor yang paling besar jika dibandingkan jenis paket lainnya.

Walaupun selama ini pembangunan pendidikan telah menunjukkan kemajuan tetapi masih terjadi kesenjangan dalam hal kemitraejajaran antara laki-laki dan perempuan. Ditinjau dari sisi pendidikan, kesenjangan tersebut terasa bila terjadi perbedaan gender yang cukup tinggi antara laki-laki dengan perempuan. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah partisipasi peserta didik perempuan. Oleh karena itu, untuk mencapai kesetaraan dan

sehingga belum terjadi keseimbangan gender (0,83). (Pusat Data dan Informasi Pendidikan, 2009).

### Peningkatan Mutu Pendidikan

Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan mutu pendidikan ada delapan jenis, yaitu 1) persentase usia peserta didik, 2) persentase peserta ujian dan lulusan, 3) persentase lulusan UNPK, 4) persentase pekerjaan tutor, 5) persentase tingkat pendidikan tutor, 6) persentase tingkat pendidikan pengelola, 7) persentase pelatihan pengelola, dan 8) satuan biaya.

Pendidikan kesetaraan untuk tiga jenjang seharusnya terdiri dari usia 7-12 tahun sampai 16-18 tahun, namun pada kenyataannya sampai lebih dari 21 tahun. Usia peserta didik Paket A terdiri dari 7-12 tahun sampai >15 tahun, Paket B terdiri dari 13-15 tahun sampai >18 tahun, sedangkan Paket C terdiri dari 16-18 tahun sampai >21 tahun.

Berdasarkan Tabel 16, usia peserta didik pendidikan kesetaraan yang sesuai dengan ketentuan

**Tabel 16. Persentase Usia Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Tahun 2008/2009**

Program	7-12 th	13-15 th	16-18 th	19-21 th	>21 th
Paket A	19.39	25.03	55.58	-	-
Paket B	-	40.95	25.64	33.41	-
Paket C	-	-	25.57	33.46	40.98
Rata2	33.3			66.7	

sebesar 33,3% sedangkan sisanya tidak sesuai usianya. Usia peserta didik Paket A terbesar pada usia >15 tahun sebesar 55,58% dan terkecil justru pada usia 7-12 tahun sebesar 19,39%. Hal ini berarti peserta didik yang bersekolah di Paket A belum sesuai dengan kebijakan pemerintah agar anak usia SD yang tidak dapat bersekolah di formal dapat masuk Paket A. Sebaliknya, untuk Paket B, usia peserta didik terbesar pada 13-15 tahun sebesar 40,95% dan terkecil pada usia 16-18 tahun sebesar 25,64%. Hal ini berarti peserta didik yang bersekolah Paket B telah sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Usia peserta didik Paket C terbesar >21 tahun sebesar 40,98% dan terkecil usia 16-18 tahun sebesar 25,57%. Hal ini berarti peserta didik yang bersekolah Paket C belum sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mengkhususkan usia 16-18 tahun.

**Tabel 17. Persentase Lulusan UNPK Pendidikan Kesetaraan menurut Tahap Tahun 2008/2009**

Program	Tahap 1	Tahap 2	Rata2
Paket A	78.38	79.75	78.80
Paket B	79.00	77.16	78.42
Paket C	57.68	65.68	60.77
Rata2	70.30	71.82	70.82

Berdasarkan Tabel 17 diketahui bahwa lulusan UNPK Paket A sebesar 78,80%, Paket B sebesar 78,42%

sedangkan Paket C sebesar 60,77%. Dengan demikian, persentase lulusan pendidikan kesetaraan sebesar 70,82%. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi jenjang pendidikan persentase lulusan UNPK makin kecil. Hal ini terlihat dari makin kecilnya persentase lulusan Paket C jika dibandingkan dengan jenis Paket lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan cukup besar minat peserta didik untuk mendapatkan ijazah tingkat SD maupun SMP dan sejalan dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

**Tabel 18. Persentase Pendidikan Tutor Pendidikan Kesetaraan Tahun 2008/2009**

Program	Guru	Nonguru
Paket A	61.70	38.30
Paket B	66.03	33.97
Paket C	70.05	29.95
Rata-rata	66.75	33.25

Berdasarkan Tabel 18, tutor pendidikan kesetaraan yang berasal dari guru sebesar 66,75%. Makin tinggi jenjang pendidikan makin banyak tutor yang berasal dari guru. Hal ini ditunjukkan dengan pekerjaan tutor sebagai guru Paket A sebesar 61,70%, Paket B sebesar 66,03%, dan Paket C sebesar 70,05%.

Berdasarkan Tabel 19, tingkat pendidikan tutor Paket A dan Paket B berasal dari lulusan SD/MI sampai S1/S2 sedangkan Paket C dari lulusan SMA/MA sampai S1/S2. Pendidikan tertinggi tutor Paket A adalah SMA/MA sebesar 39,19%, Paket B adalah Diploma sebesar 33,88%, dan Paket C adalah S1/S2.

**Tabel 19. Persentase Tingkat Pendidikan Tutor Pendidikan Kesetaraan Tahun 2008/2009**

No.	Program	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Diploma	S1/S2
1.	Paket A	0.85	6.03	39.19	33.18	20.75
2.	Paket B	0.28	7.52	28.18	33.88	30.14
3.	Paket C	0.00	0.00	11.32	25.95	62.73
	Rata2	0.26	5.39	24.70	31.72	37.94

Tabel 20. Persentase Tingkat Pendidikan Pengelola Pendidikan Kesetaraan  
Tahun 2008/2009

No.	Program	SMP/MTs	SMA/MA	Diploma	S1/S2	Jumlah
1.	Paket A	1.46	33.40	30.79	34.35	100.00
2.	Paket B	1.22	26.65	30.30	41.83	100.00
3.	Paket C	0.99	14.02	29.70	55.28	100.00
	Rata2	1.21	24.63	30.24	43.92	100.00

S2 sebesar 62,73%. Dengan demikian, rata-rata tingkat pendidikan tutor pendidikan kesetaraan adalah lulusan S1/S2 sebesar 37,94%. Berdasarkan kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa makin tinggi jenjang pendidikan maka juga makin tinggi tingkat pendidikan tutor.

Berdasarkan Tabel 20, tingkat pendidikan pengelola pendidikan kesetaraan berasal dari lulusan SMP/MTs sampai S1/S2. Pendidikan pengelola Paket A tertinggi adalah S1/S2 sebesar 34,35%, Paket B adalah S1/S2 sebesar 41,83%, dan Paket C adalah S1/S2 sebesar 55,28%. Dengan demikian, rata-rata tingkat pendidikan pengelola pendidikan kesetaraan adalah lulusan S1/S2 sebesar 43,92%. Berdasarkan kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa makin tinggi jenjang pendidikan maka tingkat pendidikan pengelola juga makin tinggi.

Tabel 21. Persentase Pelatihan Pengelola Pendidikan Kesetaraan  
Tahun 2008/2009

No.	Program	Sudah			Belum		
		Laki2	Peremp	Rata2	Laki2	Peremp	Jumlah
1.	Paket A	55.83	54.95	55.56	44.17	45.05	44.44
2.	Paket B	56.78	47.32	53.98	43.22	52.68	46.02
3.	Paket C	79.22	41.93	42.27	20.78	58.07	57.73
	Rata2	56.64	45.30	51.18	43.36	54.70	48.82

Berdasarkan Tabel 21 pengelola pendidikan kesetaraan yang telah mendapatkan pelatihan sebesar 51,18% dengan rincian Paket A sebesar 55,56%, Paket B sebesar 53,98% dan Paket C sebesar 42,27%. Bila dibandingkan antara laki-laki dan perempuan maka pengelola pendidikan laki-laki sebesar 56,64% lebih banyak mendapatkan pelatihan daripada perempuan. Pengelola laki-laki Paket A yang mendapat pelatihan sebesar 55,83%, Paket B sebesar 56,78% sedangkan Paket C sebesar 79,22%. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa makin

tinggi jenjang pendidikan maka pengelola yang mendapatkan pelatihan pendidikan kesetaraan makin kecil, namun dilihat dari jenis kelamin, makin tinggi jenjang pendidikan laki-laki mendapat pelatihan lebih besar.

Berdasarkan Tabel 22, satuan biaya Paket B yang terbesar, yaitu Rp1.057 ribu, diikuti Paket A sebesar Rp318 ribu sedangkan Paket C sebesar Rp146 ribu per tahun. Besarnya biaya Paket B karena termasuk dalam wajib belajar pendidikan dasar sehingga wajar jika satuan biaya yang digunakan paling besar. Satuan biaya Paket C yang terkecil karena kebanyakan peserta didik Paket C dibayai dari swadaya masyarakat. Jadi, satuan biaya pendidikan kesetaraan sebesar Rp 687 ribu.

Tabel 22. Satuan Biaya Pendidikan Kesetaraan  
Tahun 2008/2009 (dalam ribuan)

Program	Anggaran	Peserta Didik	Satuan Biaya
Paket A	42,512,619	133,873	318
Paket B	515,406,931	487,541	1,057
Paket C	35,222,856	242,040	146
Rata2	593,142,406	863,454	687

## Diskusi

Dengan menggunakan kelima indikator pemerataan dan standar (Tabel 1) maka diperoleh nilai pemerataan seperti dijelaskan pada Tabel 23. APK Paket A menggunakan standar 1% menjadi 50, Paket B menggunakan standar 5% menjadi 74,80 dan Paket C menggunakan standar 3% menjadi 62,00 dengan pendidikan kesetaraan sebesar 62,27. R-PD/KB menggunakan standar 20 maka Paket A menjadi 93,72, Paket B menjadi 72,15, dan Paket C menjadi 88,69 dengan pendidikan kesetaraan sebesar 84,85. R-PD/T Paket A menggunakan standar 10 menjadi 94 sedangkan Paket B dan C menggunakan standar

5 menjadi 94,80 dan 87,41 dengan pendidikan kesetaraan sebesar 92,07. PG menggunakan standar 0 maka Paket A menjadi 99,35, Paket B menjadi 89,97 dan Paket C menjadi 85,73 dengan pendidikan kesetaraan menjadi 91,68. RG menggunakan standar 1 maka Paket A menjadi 99,01, Paket B menjadi 82,00, dan Paket C menjadi 75,00 dengan pendidikan kesetaraan 83,34. Dengan demikian, nilai pemerataan Paket A sebesar 87,22 yang terbesar, diikuti Paket B sebesar 82,74, dan Paket C sebesar 79,77 dengan pendidikan kesetaraan sebesar 83,24. Jadi, dapat dikatakan makin tinggi jenjang pendidikan makin kurang merata.

Tabel 23. Nilai Pemerataan Pendidikan Kesetaraan  
Tahun 2008/2009

No.	Jenis Indikator	Paket A	Paket B	Paket C	Rata2
1.	APK	0.5	3.74	1.86	1.64
2.	R-PD/KB	21.34	27.72	22.55	24.96
3.	R-PD/T	9.4	4.74	5.72	5.41
4.	PG	0.65	10.03	14.27	9.56
5.	RG	1.01	0.82	0.75	0.83
	Nilai				
1.	APK	50.00	74.80	62.00	62.27
2.	R-PD/KB	93.72	72.15	88.69	84.85
3.	R-PD/T	94.00	94.80	87.41	92.07
4.	PG	99.35	89.97	85.73	91.68
5.	RG	99.01	82.00	75.00	85.34
	Rata2	87.22	82.74	79.77	83.24

Tabel 24. Nilai Mutu Pendidikan Kesetaraan Tahun 2008/2009

No.	Jenis Indikator	Paket A	Paket B	Paket C	Rata2
1.	% Usia PD	19.39	40.95	25.57	33.30
2.	% LIs UNPK	78.8	78.42	60.77	70.82
3.	% Tutor Guru	61.7	66.03	70.05	66.75
4.	% Tutor S1	20.75	30.14	62.73	37.94
5.	% Pengelola S1	34.35	41.83	55.28	43.92
6.	% Pelatihan Pengelola	55.56	53.98	42.27	51.18
7.	Satuan Biaya	318	1057	146	687
	Nilai				
1.	% Usia PD	38.78	81.9	51.14	57.27
2.	% LIs UNPK	78.8	78.42	60.77	72.66
3.	% Tutor Guru	61.7	66.03	70.05	65.93
4.	% Tutor S1	20.75	30.14	62.73	37.87
5.	% Pengelola S1	34.35	41.83	55.28	43.82
6.	% Pelatihan Pengelola	55.56	53.98	42.27	50.60
7.	Satuan Biaya	46.29	100.00	21.25	55.85
	Rata2	48.03	64.61	51.93	54.86

Dengan menggunakan ketujuh indikator mutu dan standar (Tabel 2) maka diperoleh nilai mutu seperti dijelaskan pada Tabel 24. %usia PD menggunakan standar 50 maka Paket A menjadi 38,78, Paket B menjadi 81,90 dan Paket C menjadi 51,14 dengan pendidikan kesetaraan sebesar 57,27. Indikator lainnya menggunakan standar 100 sehingga nilainya sama dengan indikatornya. Satuan biaya menggunakan standar yang sama Rp687 ribu maka Paket A menjadi 46,29, Paket B menjadi 100,00 (maksimal), dan Paket C menjadi 21,25 dengan pendidikan kesetaraan menjadi 55,85. Dengan demikian, nilai mutu Paket B sebesar 64,61 yang terbaik, diikuti Paket C sebesar 51,93, dan Paket A terkecil sebesar 48,03 sedangkan nilai mutu program pendidikan kesetaraan sebesar 54,86. Nilai mutu Paket B sangat besar karena standar satuan biaya digunakan rata-rata pendidikan kesetaraan sehingga nilai satuan biaya Paket B telah melebihi standar yang ditentukan. Hal ini menyebabkan mutu Paket B meningkat dan lebih besar daripada Paket A maupun Paket C.

kan oleh masyarakat sekitar 26,55% dan terkecil yang diselenggarakan lainnya. Peserta didik pendidikan kesetaraan terbesar pada kelompok usia yang lebih tua dari ketentuan (38,97%), Paket A terbesar ternyata berusia >15 tahun (55,58%), berarti tidak sesuai dengan ketentuan sedangkan Paket B terbesar adalah berusia 13-15 tahun (40,95%), berarti telah sesuai dengan kebijakan agar anak usia 13-15 tahun bersekolah di Paket B. Paket C, ternyata peserta didik terbesar juga pada usia >21 tahun (40,98%), berarti juga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila dilihat dari jenis kelamin, peserta didik Paket A lebih banyak perempuan (50,33%), Paket B (55,01%) dan Paket C (57,13%) lebih banyak laki-laki (55,01%) dan pendidikan kesetaraan juga lebih banyak laki-laki (54,78%). Peserta ujian UNPK terdapat dua tahap dengan peserta reguler pada tahap 1 sebanyak 451.958 dengan rincian terbesar pada Paket B (222.641) dan terkecil Paket A (45.869) sedangkan tahap 2 sebesar 281.138 dengan rincian terbesar

Tabel 25. Nilai Kinerja Pendidikan Kesetaraan Tahun 2008/2009

No.	Gabungan Ind	Paket A	Paket B	Paket C	Rata2
1.	Pemerataan	87.22	82.74	79.77	83.24
2.	Mutu	48.03	64.61	51.93	54.86
	Kinerja	67.62	73.68	65.85	69.05

Dengan menggabungkan nilai pemerataan dan mutu pendidikan kesetaraan maka diperoleh kinerja pendidikan kesetaraan. Berdasarkan Tabel 25 diketahui bahwa kinerja Paket B terbesar (73,68) dan Paket C terkecil (65,85) sedangkan pendidikan kesetaraan sebesar 69,05 atau hanya tercapai kurang dari 70%.

## Simpulan dan Saran

### Simpulan

Berdasarkan hasil dan bahasan maka sasaran pendidikan kesetaraan menggunakan data tahun 2008/2009 yang berasal dari putus sekolah dan lulusan tidak melanjutkan sebesar 1.956.099. Berdasarkan sasaran tersebut maka anggaran Direktorat Pendidikan Kesetaraan juga cukup besar dari Rp 418.373.609.186 ribu pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp 722.574.166 ribu pada tahun 2009.

Dilihat dari kelompok belajar pendidikan kesetaraan seperti Paket A, Paket B, dan Paket C terbesar diselenggarakan oleh PKBM sekitar 58,07% sedang-

Paket C (281.138) dan terkecil Paket A (21.006). Lulusan UNPK tahap 1 sebesar 374.336 dengan rincian terbesar juga pada Paket B (211.626) dan terkecil juga Paket A (38.157) sedangkan pada tahap 2 lulusan UNPK sebesar 202.158 dengan rincian terbesar juga pada Paket B (96.027) dan terkecil juga pada Paket A (16.958). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program Paket B sudah benar-benar tercapai sesuai dengan kebijakan yang ada sehingga lulusan yang dihasilkan pun yang terbesar.

Sesuai dengan besarnya kelompok belajar Paket B maka tutor Paket B juga terbesar 102.852 orang dan terkecil juga Paket A sebesar 14.239 orang sedangkan tutor pendidikan kesetaraan sebesar 159.612 orang. Tingkat pendidikan tutor pendidikan kesetaraan terbesar adalah S1/S2 sebesar 37,94% dan terkecil SD/MI karena hanya terdapat pada Paket A dan Paket B. Tutor Paket A terbesar dengan pendidikan SMA/MA (39,19%), Paket B terbesar dengan pendidikan diploma (33,38%) dan Paket C terbesar dengan pendidikan S1/S2 (62,73%).

Berdasarkan jenis pekerjaan maka tutor pendidikan kesetaraan sebagian besar (106.544 orang) adalah guru dan nonguru (53.268 orang). Hal ini terjadi di semua Paket baik Paket A (8.785 orang), Paket B (67.912 orang), maupun Paket C (29.647 orang). Kondisi ini mendukung pendidikan kesetaraan dapat meningkatkan mutunya karena sebagian besar berasal dari guru pendidikan formal. Tingkat pendidikan pengelola pendidikan kesetaraan sebagian besar (43,92%) adalah S1/S2 dana terkecil (1,21%) adalah SMP/MTs. Hal yang sama untuk Paket baik A (34,35%), Paket B (41,83%), maupun Paket C (55,28%).

Program Paket B menjadi primadona dalam pendidikan kesetaraan karena semua programnya termasuk kelompok belajar, peserta didik, lulusan, tutor, dan pengelola memiliki data yang terbesar. Hal yang sama juga terjadi pada dana pendidikan di mana Paket B mendapatkan dana terbesar Rp 515.406.931 ribu dengan *block grant* dengan satuan biaya sebesar Rp 1.122 ribu sehingga jumlahnya menjadi Rp 489.243.612 ribu. Program Paket A dan C juga mendapatkan dana namun kurang dari sepersepuluh dari Paket B.

Kinerja pendidikan kesetaraan diukur dari pemerataan dan perluasan akses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Perluasan akses pendidikan diukur dari APK, R-PD/KB, R-PD/T, PG, dan RG. Pendidikan Kesetaraan selama dua tahun telah meningkat dari 1,64% tahun 2008 menjadi 1,86% tahun 2009 atau meningkat 13,32% per tahun. Peningkatan APK terbesar terjadi pada Paket C dari 1,86% menjadi 2,24% atau meningkat 20,17% sedangkan peningkatan APK terkecil pada Paket B dari 3,74% tahun 2008 menjadi 4,15% tahun 2009 atau meningkat 11,02%. Ternyata walaupun Paket B dalam semua variabelnya yang terbesar ternyata dari segi APK justru peningkatannya terkecil. Indikator perluasan akses pendidikan lainnya dinyatakan dalam R-PD/KB menunjukkan Paket A yang terkecil (21,34) dan Paket B yang terbesar (27,72). R-PD/T yang terbesar atau terbaik adalah Paket B (4,74) dan terkecil adalah Paket A (9,40). Hal ini berarti tutor pada Paket B lebih mencukupi jika dibandingkan dengan Paket C terlebih Paket A sangat kekurangan. Indikator pemerataan juga dilihat dari PD dan RG. Berdasarkan PG maka hanya PG Paket A terkecil - 0,65% yang berarti perempuan lebih diuntungkan daripada laki-laki sedangkan Paket B dan Paket C

masing-masing sebesar 10,03% dan 14,27% atau laki-laki lebih diuntungkan daripada perempuan. Hal ini menyebabkan terjadi keseimbangan gender Paket A sedangkan Paket B (0,82) dan C (0,75) belum seimbang.

Peningkatan mutu pendidikan diukur dari %UsiaPD, %LIs UNPK, %Tutor Guru, %Tutor S1, %Pengelola S1, % Pelatihan Pengelola, dan satuan biaya. %Usia PD pendidikan kesetaraan yang sesuai sebesar 33,30% sedangkan sisanya tidak sesuai. %Usia PD Paket A terbesar dari usia > 15 tahun sebesar 55,58%, hal ini kurang sejalan dengan dibentuknya Paket A untuk mengatasi siswa SD/MI yang putus sekolah. Peserta didik Paket B terbesar pada usia 13-15 tahun sebesar 40,95%, hal ini sejalan dengan dibentuknya Paket B untuk mengatasi siswa yang putus SMP/MTs dan lulusan SD yang tak dapat melanjutkan ke SMP. Peserta didik Paket C terbesar berusia > 21 tahun sebesar 40,98%, hal ini kurang sejalan dengan dibentuknya Paket C untuk mengatasi siswa SM/MA yang putus sekolah. %LLs UNPK terbesar adalah Paket A sebesar 78,80% dan terkecil pada Paket C sebesar 60,77% dan rata-rata sebesar 70,82%.

%TutorGuru pendidikan kesetaraan sebesar 66,75%, terbesar adalah Paket C sebesar 70,05% dan terkecil pada Paket A sebesar 61,70%. Hal menyebabkan pendidikan kesetaraan juga akan bermutu karena sebagian besar tutornya adalah guru pada pendidikan formal. Bila dilihat dari tingkat pendidikan tutor maka ijazah tutor bervariasi dari SD/MI sampai S1/S2. Tingkat pendidikan tutor pendidikan kesetaraan yang berijazah S1/S2 (37,94%) terbesar dan berijazah SD/MI (0,26%) terkecil. Tingkat pendidikan pengelola pendidikan kesetaraan bervariasi dari SMP/MTs sampai S1/S2. Tingkat pendidikan pengelola yang berijazah S1/S2 (43,92%) yang terbesar dan berijazah SMP/MTs (1,21%) yang terkecil. Pengelola pendidikan kesetaraan yang sudah mendapatkan pelatihan sebesar 51,18% dengan rincian laki-laki (56,64%) lebih banyak yang dilatih dibandingkan dengan perempuan (45,30%). Dengan demikian, pengelola pendidikan kesetaraan harusnya dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan ketentuan. Satuan biaya pendidikan kesetaraan sebesar Rp687 ribu dengan Paket C terkecil (Rp146 ribu) dan Paket B terbesar (Rp1.057 ribu).

Dengan menggunakan pemerataan dan mutu

maka kinerja pendidikan kesetaraan sebesar 69,05 dengan Paket B terbesar (73,68) dan Paket C terkecil (65,85).

### Saran

Berdasarkan pada kinerja pendidikan kesetaraan maka saran diberikan untuk pemerataan dan mutu pendidikan kesetaraan. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan kesetaraan dan kecerdasan bangsa maka APK Paket A, Paket B, dan Paket C dapat ditingkatkan mengingat selama dua tahun telah terjadi peningkatan sebesar 13,32%. Rasio peserta didik per kelompok belajar untuk Paket A, Paket B, dan Paket C cukup memadai (sekitar 21-28 orang) sehingga dapat ditingkatkan seperti halnya ketentuan pada persekolahan. Peserta didik Paket B dan Paket C masih banyak laki-laki jika dibandingkan perempuan sehingga perlu diberikan kuota untuk peserta didik perempuan. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, peserta didik Paket A kebanyakan >15 tahun perlu dikaji ulang supaya disesuaikan dengan kebijakan Paket A yang diperuntukkan anak usia 7-12 tahun. Hal yang sama untuk Paket C karena peserta didik yang terbesar adalah usia >21 tahun. Perlu adanya penelitian khusus

mengapa lulusan Paket C sangat rendah (60,77%) dibandingkan dengan Paket A dan B (78,80% dan 78,42%). Banyaknya tutor yang berasal dari guru sebesar 66,75% supaya tetap dipertahankan atau ditingkatkan sehingga peningkatan mutu pendidikan kesetaraan benar-benar setara dengan pendidikan formal. Tutor Paket B masih sangat kecil jika dibandingkan dengan Paket A dan C, oleh karena itu perlu ditingkatkan karena Paket B merupakan guru Pamong per bidang studi. Tutor Paket A dan Paket B perlu ditingkatkan kualifikasinya karena hanya 20,75% dan 30,14% yang layak mengajar. Pengelola Paket A dan Paket B perlu ditingkatkan minimal lulusan Diploma dan Paket C minimal lulusan S1. Pengelola Paket A dan Paket B yang telah mendapatkan pelatihan lebih dari 50% sedangkan Paket C kurang dari 50% sehingga perlu ditingkatkan agar pengelola program pendidikan kesetaraan dapat menjadi bermutu. Oleh karena pendidikan adalah tanggung jawab dari pemerintah, masyarakat, dan orang tua maka peran serta masyarakat dalam pendidikan kesetaraan perlu ditingkatkan. Satuan biaya biaya pendidikan Paket C (Rp 146.ribu) dan Paket A (Rp 138 ribu) supaya ditingkatkan seperti halnya Paket B (Rp 1.057 ribu).

### Pustaka Acuan

- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009*, Jakarta: Pusat Informasi dan Humas
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009a. *Ikhtisar Pendidikan Nasional 2008/2009*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009b. *Statistik Pendidikan Nonformal 2008/2009*, Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009c. *Permerdiknas Nomor 77, Tahun tentang Ujian Nasional Program Paket A dan Paket B*. Jakarta
- Direktorat Pendidikan Kesetaraan. 2010. *Profil Pendidikan Kesetaraan dalam Fakta dan Angka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional
- Hermawan, I.K.D. Pendayagunaan Program Kesetaraan Pendidikan Nonformal: Kasus Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2008/2009. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Volume 16, Nomor 4, Juli 2010.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Profil Pendidikan Nonformal*. Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan.
- Pusat Data dan Informasi Pendidikan. 2008. *Indikator Pendidikan*. Jakarta: Bahan Pelatihan Regional
- Pusat Data dan Informasi Pendidikan. 2009. *Statistik dan Indikator Berwawasan Gender Tahun 2008/2009*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Pusat Statistik Pendidikan. 2010. APK/APM TK, SD, SMP, SM, dan PT 2009/2010. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional
- [www.KamusBahasaIndonesia.org](http://www.KamusBahasaIndonesia.org) diakses pada tanggal 20 Juni 2011